

DETASEMEN JAYENG SEKAR DI BAGELEN PADA TAHUN 1825-1856

THE JAYENG SEKAR DETACHEMENT IN BAGELEN AT THE YEAR OF 1825-1856

Oleh: Eko Cahyadi Septiyurianto, Prodi Ilmu Sejarah, Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, cvnrauvani@gmail.com

Abstrak

Pada 1808 Daendels mendirikan organisasi kepolisian di Jawa bernama Korps Jayeng Sekar yang beranggotakan kaum pribumi Jawa. Pada 1825, meletus Perang Jawa yang memaksa Belanda mengerahkan sebagian besar angkatan bersenjata di Pulau Jawa. Korps Jayeng Sekar, digabungkan dalam Resimen Kavaleri ikut dalam Perang tersebut. Setelah Perang Jawa berakhir pada 1830, terbentuklah Karesidenan baru bernama Karesidenan Bagelen yang ber-ibukota di Purworejo. Di Bagelen pasukan Jayeng Sekar berhadapan dengan sisa konflik Perang Jawa, dan problematika keamanan yang cukup serius selama kurun waktu 1830-1850. Penelitian ini ditujukan untuk mengungkap peran Detasemen Jayeng Sekar di Bagelen dalam kurun waktu 1825-1856. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peta teritorial Bagelen selalu berubah cakupannya dari masa ke masa. Namun dapat dipastikan bahwa wilayah yang disebut Bagelen adalah area yang berada di sekitar Sungai Bogowonto. Meletusnya Perang Jawa di Yogyakarta pada 1825, menjadikan Bagelen berubah menjadi medan pertempuran. Detasemen Jayeng Sekar yang diturunkan dalam perang tersebut, menunjukkan perannya dalam membalikkan keadaan Belanda yang sempat terpojok oleh pasukan Pangeran Diponegoro di awal masa Perang. Di bawah Komando Reso Diwiryo, Jayeng Sekar menunjukkan prestasinya di medan pertempuran dengan berhasil menangkap beberapa pimpinan pasukan Diponegoro. Salah satunya yang tertangkap adalah sang panglima Pangeran Kusumayudha. Setelah Perang Jawa berakhir 80 pasukan Detasemen Jayeng Sekar veteran Perang Jawa ditempatkan di Garnisun Purworejo, untuk mengamankan wilayah Karesidenan Bagelen. Mereka banyak berperan dalam pemadaman kerusuhan, dan penangkapan bandit di wilayah Bagelen.

Kata Kunci: *Detasemen, Jayeng-Sekar, Bagelen.*

Abstract

In 1808 Daendels founded a police organization in Java, called Jayeng Sekar Corps that membered by Javanese Inlanders. In 1825, Java's War Began, forced Dutch to mobilize most part of their armed forces in Java. The Jayeng Sekar Corps joint the war by merged in the cavalry regiment. After the Java's War was over in 1830, rise a new residency called Bagelen that has a capital in Purworejo. In Bagelen Jayeng Sekar army faced with the rest of the Java's War conflict, and serious security problem between 1830-1856. This research directed to reveal the act of Detachment of Jayeng Sekar in Bagelen in time of 1825-1856. This research show that territorial map of the Bagelen always changed from time to time. However it could be ensure that the region called Bagelen are the area around Bogowonto River. When Java's War begin in Yogyakarta in 1825, Bagelen became a battlefield. Detachment of Jayeng Sekar that mobilize in the war, show their act to turn Dutch unbenefit condition, stucked by Pangeran Diponegoro's army in the earlier period of the war. Commanded by Reso Diwiryo, Jayeng Sekar show their achievement in the battlefield by successfully catch some leaders of Diponegoro's rebel forces. One of them is the highest rank officer Pangeran Kusumayudha. After the Java's War was over 80 member of The Jayeng Sekar Detachment, the veteran of Java's War were placed in the Purworedjo Military Garison to secure Bagelen area. They were many involved in riots clearing, and the matter of bandits in that area.

Keywords: *Detachment, Jayeng-Sekar, Bagelen.*

A. Pendahuluan

Peletakan dasar Polisi Modern baru dimulai di Eropa oleh Louis XIV dari Perancis pada tahun 1666. Hal ini dibarengi dengan pembentukan Jabatan Letnan Polisi. Louis XIV mengatakan “Saya akan menyerahkan diri pada putusan polisi, dan saya bermaksud bahwa semua orang harus menghormati dan menaati mereka seperti yang akan saya lakukan”.¹ Seiring waktu sistem kepolisian seperti di Perancis berkembang ke seluruh daratan Eropa.

Pemerintah Republik Bataaf membawa konsep kepolisian yang berkembang di Eropa, ke Hindia Belanda. Selepas penaklukan Napoleon Bonaparte pada wilayah Belanda, Louis Napoleon (Adik Napoleon Bonaparte) menunjuk Herman Willem Daendels untuk memerintah wilayah koloni Belanda di Hindia Belanda. Ia tiba di Pulau Jawa pada tanggal 1 Januari 1800. Daendels dengan segera mere-organisasi Dewan dan hanya memberikannya hak penasihat. Lalu dia mulai bekerja memangkas korupsi, memperbaiki sistem administrasi, serta membangun jalan dan benteng. Pada awal Abad XIX kebutuhan akan sistem keamanan di wilayah kolonial Hindia Belanda memang sudah menjadi kebutuhan yang dianggap sangat penting. Oleh sebab itu pada masa ini banyak berkembang pasukan bersenjata (*Schutterijen*) baik yang merupakan milik swasta maupun milik pemerintah Hindia Belanda, misalnya Detasemen Sukarela yang beranggotakan pemuda Agama Kristen, Serdadu Polisi di Batavia, Pasukan Tombak (*Piekenirs*), dan Korps *Pradjoerit*.²

Pada 1 September 1808, Daendels memerintahkan pendirian organisasi kepolisian yang beranggotakan kaum pribumi. Polisi ini kemudian diberi nama Detasemen Jayeng Sekar. Dalam *Staatblad* ditulis dengan *Detachment Djaijang-Sekars*.³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ‘detasemen’ memiliki pengertian “sepasukan prajurit atau polisi yang ditempatkan di suatu tempat untuk menjalankan tugas”. Jayeng Sekar

¹ Philip John Stead, *The Police of France*, (London: Macmillan, 1983), hlm.85.

² Marieke Bloombergen, *Polisi Zaman Hindia Belanda: Dari Kepedulian Hingga Ketakutan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2011), hlm.16.

³ ANRI, *Staatblad van Netherlands Indie 1849* No. 30, hlm. 19.

merupakan istilah dari Bahasa Jawa yaitu *jayeng* dan *sekar*. *Jayeng* berarti kemenangan atau kejayaan sedangkan *sekar* berarti bunga. Secara harafiah arti dari Jayeng Sekar adalah ‘bunga kejayaan’.⁴ Nama Jayeng Sekar sebenarnya merupakan nama pasukan wanita pada masa Sultan Agung dari Mataram, Daendels hanya asal menggunakannya.

Kebijakan merugikan yang dilakukan pemerintah Belanda pada masa kepemimpinan Van der Capellen berupa penarikan pajak yang tidak merata, sistem sewa tanah yang tiba-tiba dihapuskan, serta adanya sistem ‘gerbang tol’, memicu perlawanan dari golongan ningrat dan para petani yang merasa dirugikan dengan adanya kebijakan tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan kemunculan beberapa gerakan sosial menentang pemerintahan kolonial di Jawa dari tahun 1822 dan berlanjut hingga tahun 1830.⁵

Wilayah Bagelen yang merupakan tetangga dari Kedu dan masih menjadi wilayah *negaragung* Kasultanan dan Kasunanan, menghadapi permasalahan yang sama sejak 1812. Walaupun hidup di wilayah subur, beban ekonomi yang dialami warga Bagelen dengan seringnya gagal panen pada paceklik era 1817-1820, ditambah lagi pajak dan bea yang tinggi, serta merebaknya kebiasaan memakai candu di masyarakat pada waktu itu, memicu berbagai permasalahan sosial. Dimulai dengan meningkatnya angka kriminalitas seperti perbanditan di beberapa wilayah Bagelen.⁶

Gelombang perlawanan demi perlawanan muncul di berbagai wilayah di Jawa Selatan terutama di wilayah bekas bumi Mataram. Puncaknya adalah perlawanan Pangeran Diponegoro yang kemudian dikenal dengan Perang Diponegoro atau Perang Jawa (1825-1830). Perang yang berlangsung selama 5 tahun ini menimbulkan rusaknya segi politik, ekonomi dan sosial masyarakat. Secara politis, kedudukan Kasultanan

⁴ “Parungsari Corog Kiai Jayeng Sekar”, http://www.griyokulo.com/20_16/05/parungsari-corog/, diakses pada 6 Maret 2017 Pukul.22.19.

⁵ Peter Carey, *Asal-Usul Perang Jawa: Pemberontakan Sepoy dan Lukisan Raden Saleh*, (Yogyakarta: LKIS, 2012), hlm. 24.

⁶ Peter Carey, *Orang Cina, Bandar Tol, Candu dan Perang Jawa*, (Depok: Komunitas Bambu, 2015), hlm. 84.

Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta melemah nilai tawarnya. Hal ini dibuktikan dengan lepasnya beberapa wilayah kedua kerajaan ini dan masuk ke dalam wilayah Pemerintah Hindia Belanda (*gouvernemen*). Bagelen yang wilayahnya masih berada di bawah kendali Kasultanan dan Kasunanan mendapat akuisisi penuh dari pihak Hindia Belanda dan dijadikan salah satu karesidenan seusai Perang Jawa berakhir.

B. Bagelen Sebagai Wilayah Penuh Gejolak Sosial (1825-1856)

Wilayah Bagelen merujuk pada suatu daerah di sebelah barat Yogyakarta di sekitar sungai Bogowonto. Asal nama Bagelen menurut W.J. van der Meulen sebagai nama lain *Holing* (Kerajaan Kalingga). Kerajaan *Holing* juga disebut dengan *Halin* dan wilayah kerajaan ini yang berada di dekat Sungai *Baghwan* (Bogowonto) disebut *Baghalin*.⁷ Sementara itu, menurut Prof. Purbatjaraka nama Bagelen berasal dari kata *Pagaluhan*, terdapat hubungan erat antara Bagelen dengan Kerajaan Galuh.⁸ Teori Purbatjaraka terkait asal nama Bagelen lebih populer dan lebih banyak diterima oleh masyarakat dibandingkan teori Van der Meulen. Banyak karya ilmiah mahasiswa yang membahas wilayah Bagelen mencantumkan teori tersebut. Namun kali ini peneliti berusaha bersikap netral dan menganggap kedua teori tersebut sebagai probabilitas belaka.

Bagelen merupakan wilayah negaragung Kerajaan Mataram. Wilayah di Pesisir Selatan Pulau Jawa ini berbatasan dengan Yogyakarta di sebelah Timur, Banyumas di Sebelah Barat, dan Kedu disebelah utara. Wilayah ini memiliki dataran tinggi yang terbentuk dari deretan Pegunungan Kendeng yang memanjang bagian utara. Dataran rendah di sebelah selatan membentuk pedesaan memanjang dari sungai Bogowonto hingga Sungai Cincingguling di Perbukitan Urut Sewu.⁹

⁷ Musafirul Huda, "Perlawanan Raden Adipati Cokronegoro Terhadap Pasukan Pangeran Diponegoro di Bagelen 1825-1830", *Skripsi*, (Yogyakarta : UNY, 2012), hlm. 27.

⁸ Radix Penadi, *Bagelen Kawasan yang Dikerdilkan*, (Purworejo: Lembaga Studi dan Pengembangan Sosial Budaya, 2005), hlm. 26.

⁹ Paschalís Maria Laksono, *Tradisi dalam Struktur Masyarakat Jawa Kerajaan dan Pedesaan: Alih-Ubah Model Berpikir Jawa*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985), hlm. 64.

Pasca Perang Jawa, melalui perjanjian tahun 1830, wilayah Bagelen dianeksasi dalam wilayah di bawah kekuasaan langsung, Pemerintah Hindia Belanda (*gubernemen*). Melalui perjanjian tanggal 20 juni 1830, Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan dituntut untuk melepaskan wilayah *mancanegara* dan *negaraagung* kepada pemerintah Hindia Belanda.¹⁰ Sebagai gantinya, Pemerintah Hindia Belanda memberikan kepada kompensasi masing masing f 120.000 kepada Kasultanan dan Kasunanan atas pengambilan wilayah Bagelen.¹¹ Masuknya wilayah Bagelen sebagai wilayah Hindia Belanda mengubah peta politik di Jawa. Wilayah Bagelen tidak lagi menjadi daerah yang terpecah belah namun menjadi satu kesatuan. Walaupun demikian, kebijakan ini tetap merugikan bagi Kasunanan Surakarta, karena mereka harus melepas wilayah potensial mereka ke tangan Pemerintah Hindia Belanda.

Pembagian tanah untuk sewa diselesaikan secara terperinci di Kedu jauh sebelum pemerintahan Van der Capellen yaitu sejak 1812 dan diakhiri tahun 1818. Namun di wilayah ini tidak ada tuntutan untuk pembagian ulang setiap tahunnya. Hal ini berbeda dengan Pacitan yang pada masa itu, juga diambil alih oleh pemerintahan kolonial. Pembagian secara terperinci di Pacitan disertai dengan tuntutan untuk menanam pohon kopi dan merica yang bisa mendorong penyamarataan pembagian tanah. Pembagian tanah di Bagelen secara sama baru dilakukan pasca Perang Diponegoro (1830-1832).¹²

Gubernur Jenderal Van der Capellen berusaha melindungi petani dari penyewa tanah swasta. Bahkan, secara resmi tahun 1823 ia memerintahkan menghapuskan sistem sewa tanah. Untuk mengatasi kekurangan pemasukan kas Pemerintah Hindia Belanda, Van der Capellen memusatkan penghasilan negara pada pajak, bea, dan kerja wajib di seluruh wilayah di bawah kekuasaan *gubernemen*. Van der Capellen juga berinisiatif untuk mengklaim penuh hasil atas pemasukan dari gerbang tol yang sejak lama menjadi sengketa antara Pemerintah Hindia Belanda dengan penguasa *Vorstenlanden*. Sengketa yang berlangsung sejak masa

¹⁰ Masjkuri, d.k.k., *Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Jakarta: Depdikbud, 1977), hlm.119.

¹¹ Vincent James Houben, *Kraton dan Kumpeni*, (Yogyakarta: Bentang, 2003), hlm.111.

¹² Suhartono, *Jawa: Bandit-Bandit Pedesaan, Studi Historis 1850-1942*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 38

Pemerintah Inggris ini tidak pernah selesai hingga pasca perang Jawa, yang memaksa para Raja Mataram mengakui klaim Pemerintah Hindia Belanda atas cukai tersebut,

Van der Capellen yang melakukan tindakan ini untuk membela kepentingan kaum petani, justru mendapat tentangan keras dari para petani dan bangsawan. Para petani merasa dirugikan akibat mereka harus dibebani berbagai macam pajak, dan kerja wajib. Hal tersebut antara lain, pajak tanah, pajak pembangunan jembatan, pajak jalan, bea pasar, pajak ternak, dan lain sebagainya.¹³ Puncak perlawanan kaum petani dan bangsawan terjadi pada Perang Jawa (1825-1830).

C. Detasemen Jayeng Sekar Sebagai Polisi Masa Kolonial (1808-1874)

Korps Jayeng Sekar merupakan pasukan kavaleri bersenjata ringan, yang ditujukan untuk mengawal keamanan di wilayah pedalaman di Pulau Jawa. Namun menurut Peter Carey, pasukan ini kurang efektif untuk menjangkau ke pedesaan. Hal ini terkait dengan jumlahnya yang terbatas.¹⁴ Pada awal pembentukan, pasukan ini berjumlah 1000 personel di seluruh Jawa. Jumlah ini kemudian dikembangkan menjadi 1450 personel pada 1810, bersamaan dengan penetapan peraturan tentang Korps Jayeng Sekar (*besloten voor het corps djajang sekars*).¹⁵

Korps Jayeng Sekar adalah satuan pasukan berkuda yang terpisah dari kesatuan *O.I. Kavallerie*. Sebagai pimpinan tertinggi mereka adalah Marsekal angkatan bersenjata yang akan berkoordinasi dengan Gubernur Jenderal sebagai pengawas. Bertanggung jawab kepada Marsekal dan Gubernur Jenderal seorang Letnan Kolonel dan Inspektur yang berkedudukan di Semarang. Mereka yang akan mengkoordinasi beberapa kompi dibawahnya, yang ditempatkan pada masing masing prefektur dibawah tanggung jawab *Landdrost*. Jabatan *landdrost* ini tetap ada hingga masa pendudukan Inggris dimana Jabatan ini dihapuskan, dan dibentuk

¹³ Reko Pambudi, "Perkembangan Sosial, Politik, dan Ekonomi di Kabupaten Temanggung 1834-1890", *Skripsi*, (Yogyakarta : UNY, 2012), hlm. 2.

¹⁴ Peter Carey, *The Power of Prophecy: Prince Dipanagara and the end of an Old order in Java, 1785-1855*, (Leiden: KITLV, 2007) , hlm. 52.

¹⁵ Jacobus Anne Van der Chijs, *Netherlandsch Indies Plakaatboek 1602-1815*, hlm. 234.

satuan daerah karesidenan (*residency*). Korps ini direkrut dari putra para *Priyayi Jawa (Inlandsch Ambtenaar)* terutama putra para Demang atau Mantri. Para calon anggota Korps Jayeng Sekar tidak serta merta diterima begitu saja walaupun mereka anak priyayi. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota Jayeng Sekar. Untuk masuk dalam keanggotaan Jayeng Sekar, para calon harus memiliki badan yang tegap dan pandai berkelahi.¹⁶ Selain keahlian dalam berkelahi, dalam pasal 6 keputusan tahun 1810, sudah disebutkan bahwa calon anggota Korps Jayeng Sekar harus mempunyai keahlian menunggang kuda karena tidak akan ada pelatihan khusus menunggang kuda dari Korps.

Pelatihan difokuskan pada latihan menembak dan Anggar. Semasa Pemerintahan Belanda, bagi tiap militer Belanda anggar menjadi kewajiban untuk dipelajari. Pemerintah Hindia Belanda menyediakan pelatihan selama 1 tahun untuk mempelajari teknik menggunakan sable. Sabel adalah senjata utama pasukan Jayeng Sekar selain pistol, oleh karena itu pelatihan ini sangat vital.¹⁷ Seragam pasukan Korps Jayeng Sekar memiliki bentuk yang sama dengan Korps *O.I. Kavallerie* yaitu baju lengan panjang berwarna biru, dengan *track pants* (celana panjang untuk lari) berwarna putih, sepatu berkuda berwarna hitam. Perbedaannya terletak pada bentuk kancing dan hiasan sutra pada sisi seragam mereka. Bagian bawah topi mereka berasal dari Luton dan topinya membentuk bulan separuh di depan.¹⁸

Perubahan mendasar dari bentuk Korps ke dalam bentuk Detasemen dimulai saat diterbitkannya Resolusi Gubernur Jenderal Johannes Van den Bosch tanggal 5 November 1832 No. 3, 6, 8 dan 61. Perubahan ini terkait adanya perbedaan peta politik dan struktur pemerintahan di Hindia Belanda sejak penetapan

¹⁶ Erma Yulihastin, *Bekerja Sebagai Polisi*, (Jakarta: Erlangga Mahameru, 2008), hlm.6.

¹⁷ Faidhilah Kurniawan, *Mengenal Cabang Olahraga Klasik; Anggar*, <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/132313281/BUKU%20MENGENAL%20OLAHRAGA%20ANGGAR.pdf>, diakses 1 Juni 2017 Pukul 17.00, hlm.15.

¹⁸ Luton adalah Sebuah kota di Inggris, terletak di 50 km barat laut kota London. Kota ini sangat terkenal sebagai kota penghasil topi di Eropa. Pada abad ke 18, kota ini menjadi kota Industri besar, dan topi masih tetap diproduksi walaupun dalam skala kecil., "Luton", <https://en.wikipedia.org/wiki/Luton>, diakses 1 Juni 2017 Pukul 15.42 WIB.

peraturan tahun 1810. Namun peraturan ini ditetapkan hanya berlaku hingga 1 Januari 1861.¹⁹ Menyusul Resolusi tahun 1832, peraturan tentang Detasemen Jayeng Sekar (*Reglement voor de Detachementen Djaijang Sekar op Java*) yang bahkan sebagian pasalnya merupakan kondisi yang sudah berlaku sebelum 1830. Peraturan ini dipertegas melalui keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 17 Juni 1849 No. 9.²⁰

Detasemen ini beranggotakan inti orang Eropa dan pribumi Jawa yang patuh dan setia pada Pemerintah Hindia Belanda dan tidak memiliki catatan kriminal. Syarat ini lebih plural ketimbang sebelumnya yang mengharuskan calon anggota Detasemen Jayeng Sekar adalah putra dari pejabat. Selain orang Eropa dan Jawa, detasemen ini diperbolehkan merekrut orang Bengali (Bangladesh), Ambon dan orang-orang Bugis, yang telah meninggalkan tentara dalam secara terhormat, telah gagal menghasilkan sertifikat, atau atas penunjukkan dari Departemen Kehakiman, di Makassar.²¹ Seorang calon serdadu pribumi wajib lolos semacam uji sertifikasi untuk menjadi tentara. Namun, bagi mereka yang tidak lolos, bisa bergabung dalam Detasemen Jayeng Sekar.

D. Peran Detasemen Jayeng Sekar Dalam Perang Jawa Di Bagelen (1825-1830)

Detasemen Jayeng Sekar pada masa Perang Jawa juga dilibatkan sebagai pendukung pasukan resimen kavaleri. Surat laporan dari Jenderal De Kock pada Komisaris Jenderal menunjukkan bahwa pasukan Jayeng Sekar dari Pekalongan dan Tegal telah tiba di Bagelen pada bulan Mei 1828. Pasukan ini terlibat dalam pengepungan Pasukan Pangeran Diponegoro di desa Pekutan (sekarang masuk kecamatan Bayan, Purworejo) pada 26 Mei 1828. Kolonel Clereens sendiri memimpin pengepungan itu, bersama Pasukan Kavaleri dan 85 personil Detasemen Jayeng Sekar. Pimpinan Pasukan Diponegoro yang berada ditempat itu maju ke depan seperti ingin membuka perundingan. Namun Clereens bersikap hati-hati dengan menjaga jarak 150 langkah dari musuhnya. Ia mencurigai adanya kemungkinan serangan mendadak dari kavaleri yang masih

¹⁹ "Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap der Kunsten en Wetenschappen", https://archive.org/stream/verhandelingsv371875bata/verhandel_i_ngenv371875_bat_a_djvu.txt, hlm. 153., diakses 4 Juni 2017, Pukul 2.10 WIB.

²⁰ ANRI, *Staatsblad van Nederlands Indie* No. 30 tahun 1849.

²¹ *Ibid.*

disembunyikan musuh. Benar saja 17 anggota Pasukan Diponegoro berusaha menyerang Clereens yang mengakibatkan dirinya terluka. Pasukan Jayeng Sekar dan Kavaleri dengan sigap menyelamatkan sang kolonel dan membalas serangan tersebut. Pasukan Diponegoro mengalami kekalahan telak. Pasukan Kavaleri menyita 2 spanduk, 40 tombak dan beberapa keris. Selain itu, 5 Panji di ambil dari pembawa bendera yang sudah mati. Dari pihak Clereens, satu anggota Jayeng Sekar dari Tegal terluka dan satu Kuda dari Pasukan Jayeng Sekar Pekalongan mati.²²

Reso Diwiryo mengambil alih operasi pasukan Jayeng Sekar setelah dirinya ditunjuk sebagai Tumenggung wilayah Brengkelan. Hal ini diawali dari keterlibatannya pada peristiwa bulan November 1828 yaitu penangkapan Tumenggung Brengkelan yang ditunjuk oleh Pangeran Diponegoro. Dengan demikian, wilayah Brengkelan yang sudah diduduki Pangeran Diponegoro jatuh ke tangan Pemerintah Hindia Belanda.

D. Detasemen Jayeng Sekar Di Bagelen Pasca Perang Jawa 1830-1856

Untuk mengoptimalkan penjagaan keamanan di wilayah Bagelen, pemerintah mengandalkan Korps Pradjoerits dan Detasemen Jayeng Sekar. Banyak perubahan terjadi dalam kedua satuan polisi ini antara tahun 1837-1838.²³ Di Bagelen, salah satu Perwira Detasemen Jayeng Sekar ditempatkan sebagai instruktur Korps Pradjoerits. Penunjukkan instruktur dilakukan oleh Residen dan Inspektur angkatan bersenjata (*Inspecteur van Schutterijen*). Semenjak Gubernur Jenderal Van der Capellen menetapkan peraturan untuk angkatan bersenjata di Jawa (*reglement voor de schutterijen op Java*) pada 9 Juni 1838, Detasemen Jayeng Sekar dan Korps Pradjoerits mengalami pembenahan dibidang seragam dan senjata.

²² Huibertus Gerardus Nahuijs van Burgst, *Verzameling van officiële rapporten, betreffende den oorlog op Java in de jaren 1825-1830*.

²³ Korps Pradjoerits adalah pasukan infanteri bentukan Pemerintah Hindia Belanda yang beranggotakan masyarakat pribumi Jawa. Mereka ditempatkan di setiap kabupaten dibawah tanggung jawab bupati, namun bupati tidak memiliki kewenangan memberi perintah. Dalam masa perang, mereka dilibatkan dalam satuan resimen tantara seperti halnya Detasemen Jayeng Sekar. Sebagai polisi, tugas mereka mengamankan wilayah kabupaten dibawah kekuasaan *gubernemen.*, ANRI, *Regering Almanak voor Nederlandsch Indie 1867*, (Batavia: Landsdrukkerij, 1867), hlm. 47-48.

Keberadaan kedua satuan pasukan ini sebagai aparat penegak hukum, sebenarnya menimbulkan dualisme dalam sistem kepolisian. Hal ini tidak hanya berlaku di Bagelen, namun berlaku di seluruh Hindia Belanda. Hal ini terus terjadi hingga akhir abad XIX, saat tugas Detasemen Jayeng Sekar dan Korps Pradjoerit digantikan oleh agen kepolisian dibawah kementerian kehakiman.

Keunikkan yang terjadi di Bagelen adalah keputusan R.A.A. Tjokronagoro I untuk langsung memimpin Detasemen Jayeng Sekar. Pada umumnya Bupati di ibukota karesidenan akan menunjuk seseorang untuk mewakilinya menjadi komandan Detasemen Jayeng Sekar. Biasanya yang dipilih adalah kerabat dekatnya.²⁴ Namun hal ini tidak berlaku di Bagelen. Sang Bupati Purworejo lebih memilih memimpin pasukan di lapangan, saat operasi penumpasan kriminalitas maupun pemberontakan kecil yang sering terjadi di Bagelen pasca Perang Jawa. Dalam tugasnya, Tjokronagoro I didampingi seorang *Opper-Wachmesteeer* Eropa yang juga bertugas mengawasi sang komandan.

Ruekkenar dalam laporan tahunannya terlalu memuji kinerja perwiranya di kepolisian. Namun kenyataan yang terjadi dilapangan kinerja Detasemen Jayeng Sekar di Bagelen tidak bisa di bilang optimal. Hal ini disebabkan karena jumlah anggota Detasemen Jayeng Sekar yang terbatas dan hanya ditempatkan di ibukota karesidenan yaitu Purworejo. Setiap Detasemen hanya terdiri dari 85 personil Detasemen Jayeng Sekar tidak dapat menjangkau area seluas 3831 km² dalam waktu yang singkat.²⁵ Apalagi tindakan yang dilakukan Detasemen Jayeng Sekar di Bagelen sebagai polisi, lebih bersifat represif ketimbang pencegahan.

D. Kesimpulan

²⁴ Marieke Bloombergen, *Polisi Zaman Hindia Belanda: Dari Kepedulian Hingga Ketakutan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2011), hlm.16.

²⁵ Umumnya, Anggota Detasemen Jayeng Sekar di Setiap Karesidenan hanya berjumlah 30-60 personil. Namun di Bagelen Jumlah itu dipertahankan seperti masa Perang Jawa yaitu berjumlah 80 personil dengan pertimbangan keamanan wilayah Bagelen yang belum stabil pasca Perang Jawa., A.W. Sythoff, *Java: Toonelen Uit Het Leven.: Karaschterschetsen en Kleederdragten van Java's Bewoners*, (Leiden: tp, 1855), hlm. 240.

Pada awal abad ke-17, Bagelen merupakan wilayah negaragung Kerajaan Mataram Islam. Wilayah di Pesisir Selatan Pulau Jawa ini berbatasan dengan Yogyakarta di sebelah Timur, Banyumas di Sebelah Barat, dan Kedu disebelah utara. Wilayah ini memiliki dataran tinggi yang terbentuk dari deretan Pegunungan Kendeng yang memanjang bagian utara. Dataran Rendah di sebelah selatan membentuk pedesaan memanjang dari sungai Bogowonto hingga Sungai Cincingguling di Perbukitan Urut Sewu. Setelah beberapa periode menjadi wilayah kekuasaan dari Kerajaan Mataram Islam, peta wilayah Bagelen terpecah-pecah dalam kekuasaan dua kerajaan, yaitu Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Hal ini terjadi akibat perjanjian Giyanti 1755.

Pada masa Perang Jawa, wilayah ini menjadi medan pertempuran antara Pasukan Pendukung Pemerintah Hindia Belanda, melawan Pasukan Pangeran Diponegoro. Untuk membantu jalannya peperangan di Bagelen, Pemerintah Belanda mendatangkan 85 personil Jayeng Sekar yang berasal dari Tegal dan Pekalongan. Mereka terlibat dalam pengepungan pasukan pengikut Pangeran Diponegoro di Desa Pekutan pada 1826. Setelah seorang wakil senopati pasukan Kasunanan Surakarta yang ikut membantu pasukan Belanda menghadapi pasukan Pangeran Diponegoro diangkat menjadi Tumenggung Brengkelan, pasukan Jayeng Sekar diserahkan di bawah pimpinan sang wakil senopati tersebut. Orang itu adalah Reso Diwiryo yang kelak di kemudian hari dikenal dengan nama Cokronegoro I (Tjokronegoro I). Di bawah pimpinan Reso Diwiryo, pasukan Jayeng Sekar memainkan peran yang cukup vital selama masa Perang Jawa di Bagelen. Mereka bersama Reso Diwiryo, berhasil menangkap beberapa pimpinan pasukan Diponegoro, dan membunuh panglima kepercayaan sekaligus paman Pangeran Diponegoro yang bernama Pangeran Jayakusuma.

Pasca Perang Jawa, kondisi di Bagelen belum sepenuhnya aman. Beberapa pemberontakan kecil masih sering terjadi. Oleh sebab itu, maka terjadi militerisasi di kawasan Bagelen. Detasemen Jayeng Sekar yang berada di Bagelen, dipimpin langsung oleh Reso Diwiryo, yang waktu itu telah menjadi Bupati Purworejo dengan gelar R.A.A. Tjokronegoro I. Walaupun menjabat sebagai bupati, ia masih sering

memimpin Detasemen Jayeng Sekar melakukan tugas dilapangan. Salah satunya ketika melakukan pengejaran terhadap Amad Sleman di Desa Secang.

Daftar Pustaka

Arsip

ANRI, *Staatsblad van Nederlands Indie* No. 30 tahun 1849. Berisi tentang aturan penyelenggaraan logistik dan segala aturan lain terkait Detasemen Jayeng Sekar.

ANRI, *Regering Almanak voor Nederlandsch Indie 1867*, Batavia: Landsdrukerij, 1867.

Huibertus Gerardus Nahuijs van Burgst, *Verzameling van officiële rapporten, betreffende den oorlog op Java in de jaren 1825-1830*, berisi tentang Salinan berkas laporan pada masa Perang Jawa 1825-1830.

Jacobus Anne Van der Chijs, *Nederlandsch Indies Plakaatboek 1602-1815*, Berisi tentang Salinan Surat Keputusan Pemerintah Hindia Belanda (*Besluiten van Gouvernement*) , termasuk peraturan tentang Korps Jayeng Sekar tahun 1810.

Buku-Buku

Bloombergen, Marieke, *Polisi Zaman Hindia Belanda: Dari Kepedulian Hingga Ketakutan*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2011.

Carey, Peter, *The Archive of Yogyakarta I: Documents Relating to Politics and Internal Court Affairs*, (Oxford: Oxford University Press, 1980.

_____, *The Power of Prophecy: Prince Dipanagara and the end of an Old order in Java, 1785-1855*, Leiden: KITLV, 2007.

_____, *Orang Cina, Bandar Tol, Candu dan Perang Jawa*, (Yogyakarta : Komunitas Bambu, 2008.

Erma Yulihastin, *Bekerja Sebagai Polisi*, Jakarta: Erlangga Mahameru, 2008.

Houben, Vincent van, *Kraton dan Kumpeni*, Yogyakarta: Bentang Budaya, 2003.

Masjkuri, d.k.k., *Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jakarta: Depdikbud, 1977.

Paschalis Maria Laksono, *Tradisi dalam Struktur Masyarakat Jawa Kerajaan dan Pedesaan: Alih-Ubah Model Berpikir Jawa*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985.

Radix Penadi, *Bagelen Kawasan yang Dikerdilkan*, Purworejo: Lembaga Studi dan Pengembangan Sosial Budaya, 2005.

Shytoff, A.W., *Java: Toonelen Uit Het Leven:: Karaschetsen en Kleederdragten van Java's Bewoners*, Leiden: tp, 1855.

Stead, Philip John, *The Police of France*, London: Macmillan, 1983.

Suhartono, *Jawa: Bandit Bandit Pedesaan (Studi Historis 1850-1942)*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Skripsi

Musafirul Huda, "Perlawanan Raden Adipati Cokronegoro Terhadap Pasukan Pangeran Diponegoro di Bagelen 1825-1830", *Skripsi*, Yogyakarta : UNY , 2012.

Reko Pambudi, "Perkembangan Sosial, Politik, dan Ekonomi di Kabupaten Temanggung 1834-1890", *Skripsi*, Yogyakarta : UNY, 2012.

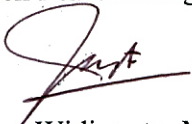
Situs Web

Faidhilah Kurniawan, *Mengenal Cabang Olahraga Klasik; Anggar*, <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/132313281/BUKU%20MENGENAL%20OLAHRAGA%20ANGGAR.pdf>, diakses 1 Juni 2017 Pukul 17.00.

"Luton", <https://en.wikipedia.org/wiki/Luton>, diakses 1 Juni 2017 Pukul 15.42 WIB.

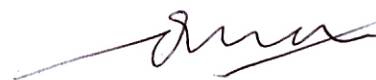
"Parungsari Corog Kiai Jayeng Sekar", <http://www.griyokulo.com/2016/05/parungsari-corog/>, diakses pada 6 Maret 2017 Pukul.22.19.

Dosen Pembimbing TAS



Danar Widiyanta, M.Hum.
NIP. 19681010 199403 1 001

Yogyakarta, 10 Januari 2018
Reviewer



Dra. Dina Dwi Kurniarini, M.Hum.
NIP.19571209 198702 2 001